



LAPORAN KINERJA 2024

BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia



LAPORAN KINERJA 2024

**BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL**

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

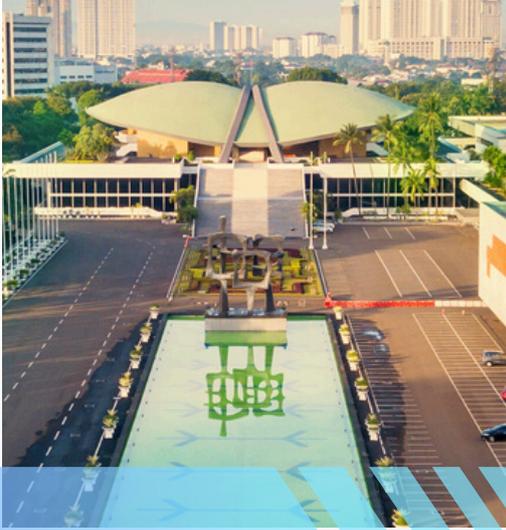
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2025

Inspektur II,

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA

NIP.196811251993022001



TIM PENYUSUN

KETUA

Beny Rahbandiyosa Sabri, S.E

ANGGOTA

Miranti Widiani, S.Sos., M.Si.

Iis Muldiyanti, S.Sos., M.M.

Helen, S.Sos., M.A.P.

Saeful Anwar, S.IP., M.E

Erman Suhendri, S.Sos.I.

Siti Masitoh



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T., karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya tahun 2024 dapat dilalui dengan baik. Peran dari BKSAP DPR-RI sebagai pintu gerbang diplomasi parlemen dapat dilaksanakan dengan baik pada tahun 2024, dengan telah terselenggaranya tiga konferensi internasional, walau dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kebijakan Pemerintah dengan melakukan realokasi dan refocusing anggaran DIPA Tahun 2024 yang memberikan efek cukup signifikan pada keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sidang dalam negeri dan juga kunjungan luar negeri Anggota DPR RI dalam rangka peran Diplomasi Parlemen. Biro KSAP juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga hubungan bilateral dan multilateral tetap produktif di tengah situasi politik domestik yang dinamis, sekaligus memastikan bahwa agenda diplomasi parlemen tetap berjalan lancar dan selaras dengan kepentingan strategis Indonesia di kancah global.

Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional (Biro KSAP dan OI) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam hal ini, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro KSAP dan OI melalui Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Kinerja Tahun 2024 Biro KSAP dan OI menyajikan berbagai capaian strategis dan keberhasilan di lingkup Biro KSAP dan OI. Selain dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dan peningkatan kinerja menuju terwujudnya *Good Governance*, laporan ini sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan para pemangku kepentingan Biro KSAP dan OI.



Akhir kata, perkenankan kami untuk menerima masukan, saran dan kritik serta pandangan konstruktif yang difokuskan untuk kesempurnaan Laporan Kinerja ini, yang selanjutnya akan terus mengikuti perkembangan dinamika sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Endah TD Retnoastuti
Kepala Biro KSAP dan OI



EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional (Biro KSAP dan OI) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam hal ini, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro KSAP dan OI melalui Perjanjian Kinerja (PK) atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024, sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja tahun mendatang, serta sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro KSAP dan OI dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

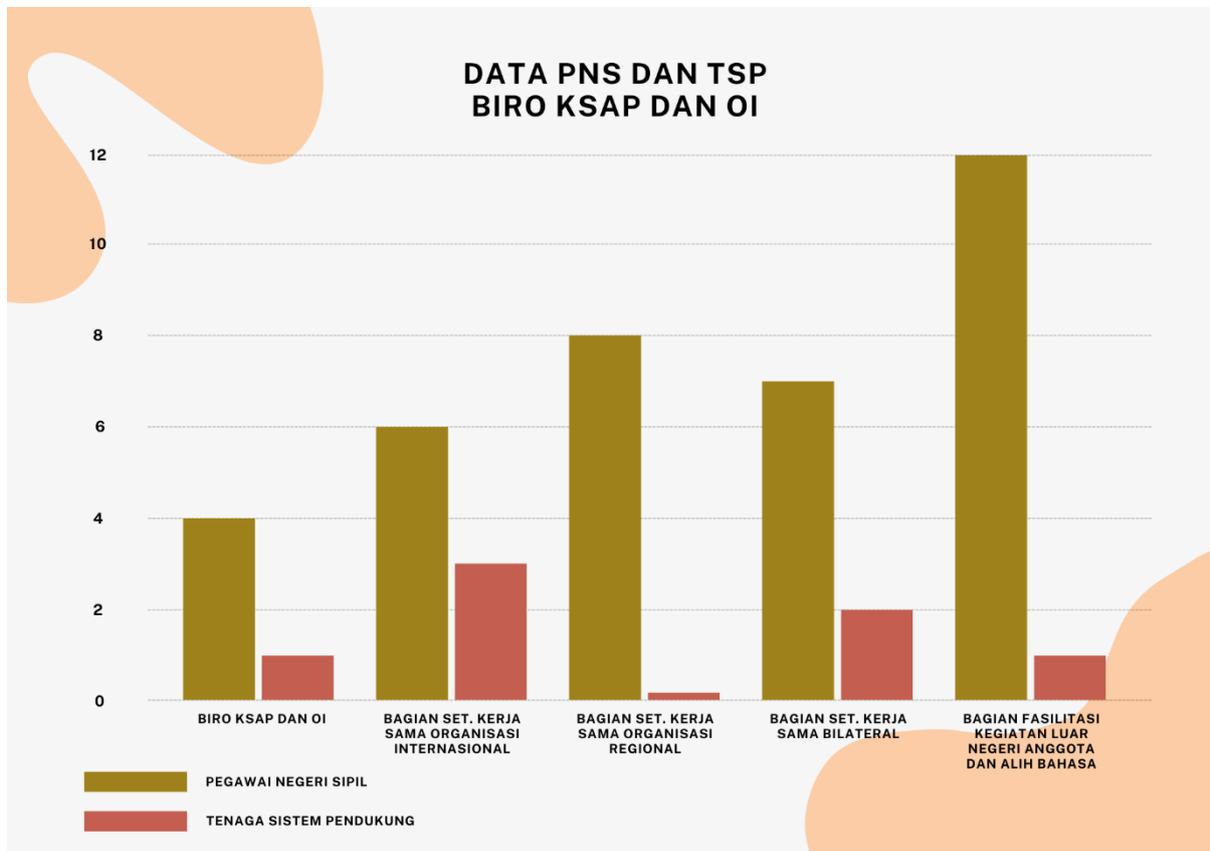


Gambar 1: Unit Kerja di Lingkungan Biro KSAP dan OI

Biro KSAP dan OI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Kesekretariatan Kerja Sama antar Parlemen dan Organisasi Internasional serta layanan alih bahasa. Fungsi tersebut didukung oleh 4 (empat) unit kerja setingkat eselon III dan kelompok Jabatan Fungsional.

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen berjumlah 52 orang, terdiri dari Kepala Biro, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Sistem Pendukung (TSP) di 4 unit kerja, yaitu:

1. Bagian Set. Kerja Sama Bilateral
2. Bagian Set. Kerja Sama Organisasi Regional
3. Bagian Set. Kerja Sama Organisasi Internasional
4. Bagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa

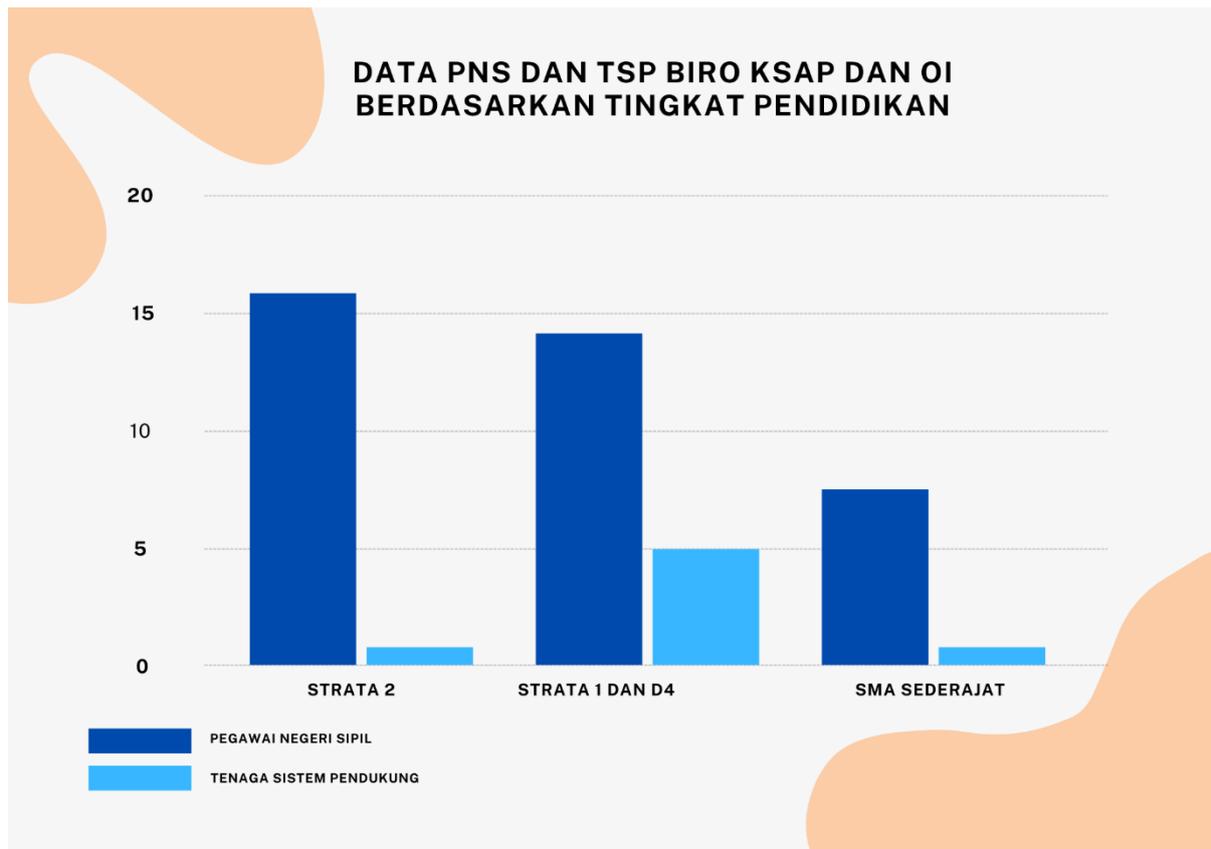


Gambar 2: Grafik data PNS dan TSP di lingkungan Biro KSAP tahun 2024

Disamping pegawai Negeri Sipil, Biro Kerja Sama Antar Parlemen juga didukung oleh 10 orang Tenaga Ahli yang memberikan dukungan dalam hal substansi dan keahlian kepada anggota BKSAP.

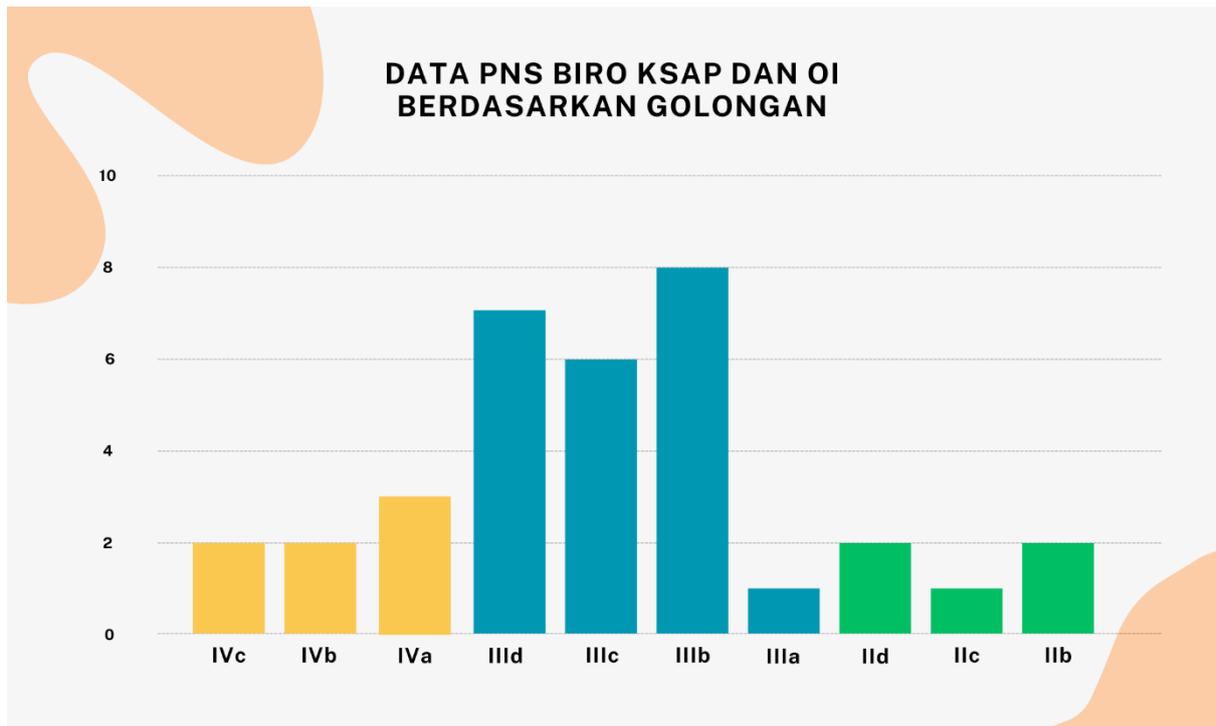
Dalam hal kualitas, BKSAP didukung dengan pegawai yang semakin tahun semakin meningkat latar belakang pendidikannya. Tahun 2024, terdapat 16 PNS yang memiliki latar pendidikan S2, 14 orang PNS merupakan lulusan S1 dan D4, dan 7 orang PNS

lulusan SLTA. Sedangkan untuk Tenaga Sistem Pendukung (TSP), BKSAP didukung oleh 1 orang TSP yang memiliki latar pendidikan S2, 5 orang TSP merupakan lulusan S1 dan 1 orang TSP lulusan SLTA. Dengan latar belakang pendidikan yang semakin tinggi diharapkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas masing-masing semakin meningkat dan berkualitas, memiliki kemampuan manajerial yang semakin baik, berkoordinasi, komunikasi dan beradaptasi terhadap perubahan organisasi juga semakin mumpuni. Berikut ini tabel pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:



Gambar 3: Grafik data PNS dan TSP di lingkungan Biro KSAP berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.

Berdasarkan Golongan, Biro KSAP memiliki pegawai yang mayoritas golongan III, hal ini berarti bahwa masa kerja dan pengalaman serta kemampuan PNS di lingkungan Biro KSAP sudah baik. Sedangkan PNS Golongan I di Biro KSAP sudah tidak ada, dan untuk mengisi pekerjaan yang berkaitan dengan pengantaran surat dan penyajian jamuan rapat dilakukan oleh TSP. Berikut ini grafik PNS di Lingkungan Biro KSAP berdasarkan golongan.



Gambar 4: Grafik Data PNS di lingkungan Biro KSAP dan OI berdasarkan Golongan Tahun 2024



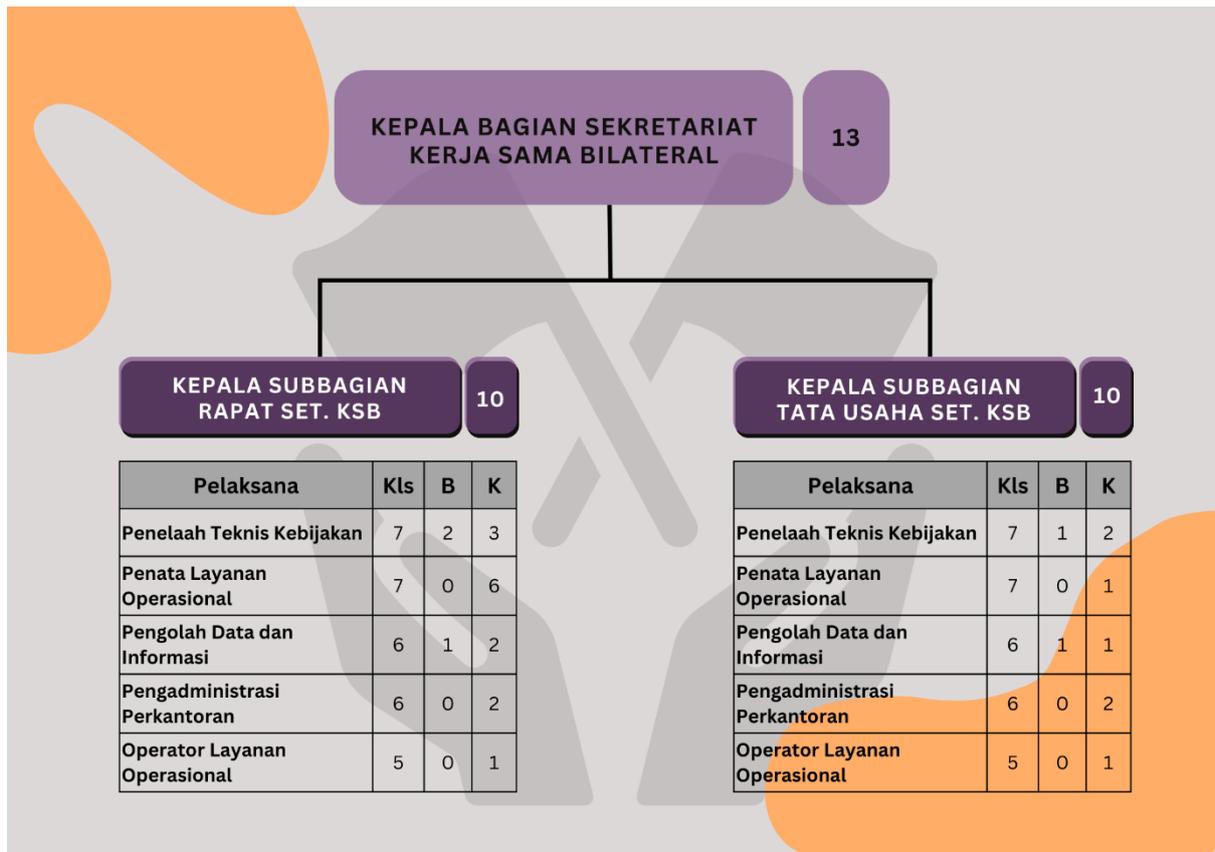
Gambar 5: Peta jabatan di Biro KSAP dan OI berdasarkan SK Sekjen Nomor 1504/SEKJEN/2024



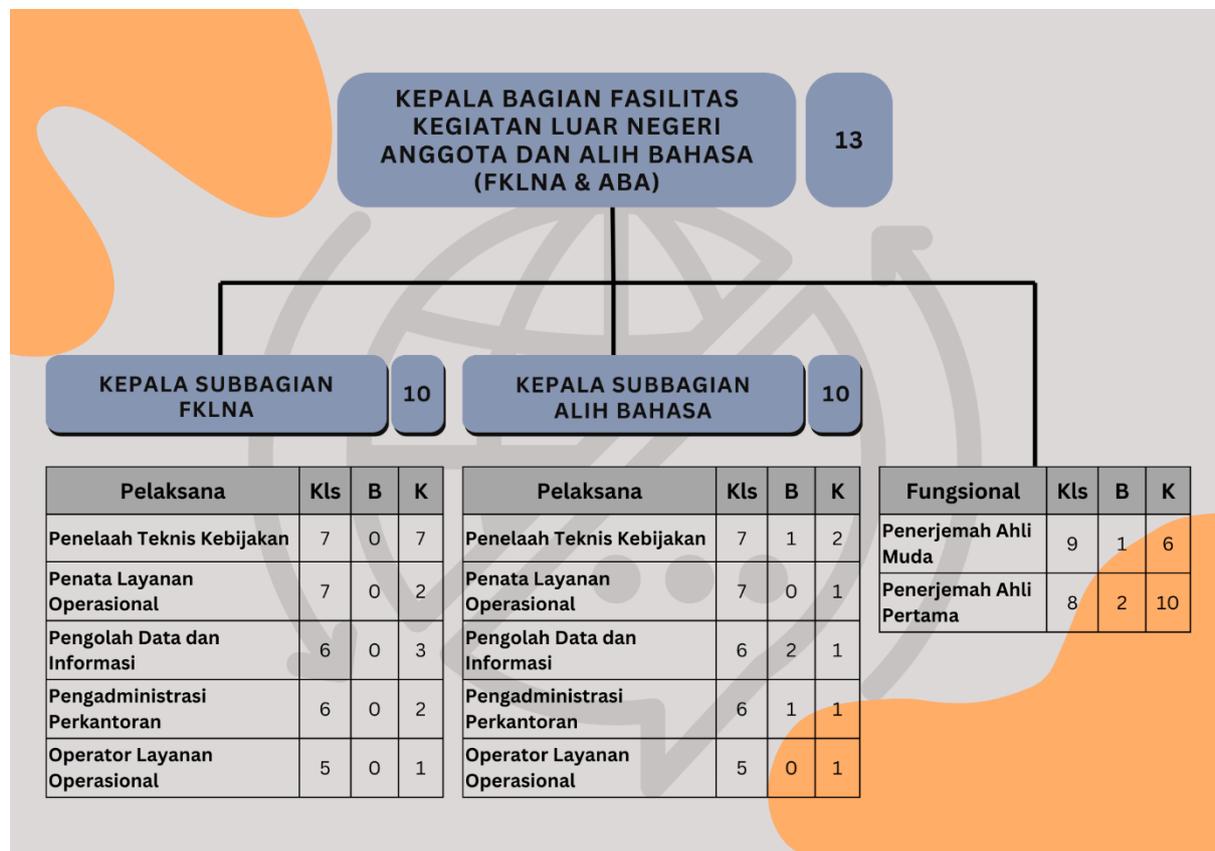
Gambar 6: Peta jabatan dan kebutuhan pegawai Bagian KSOI berdasarkan SK Sekjen Nomor 1504/SEKJEN/2024



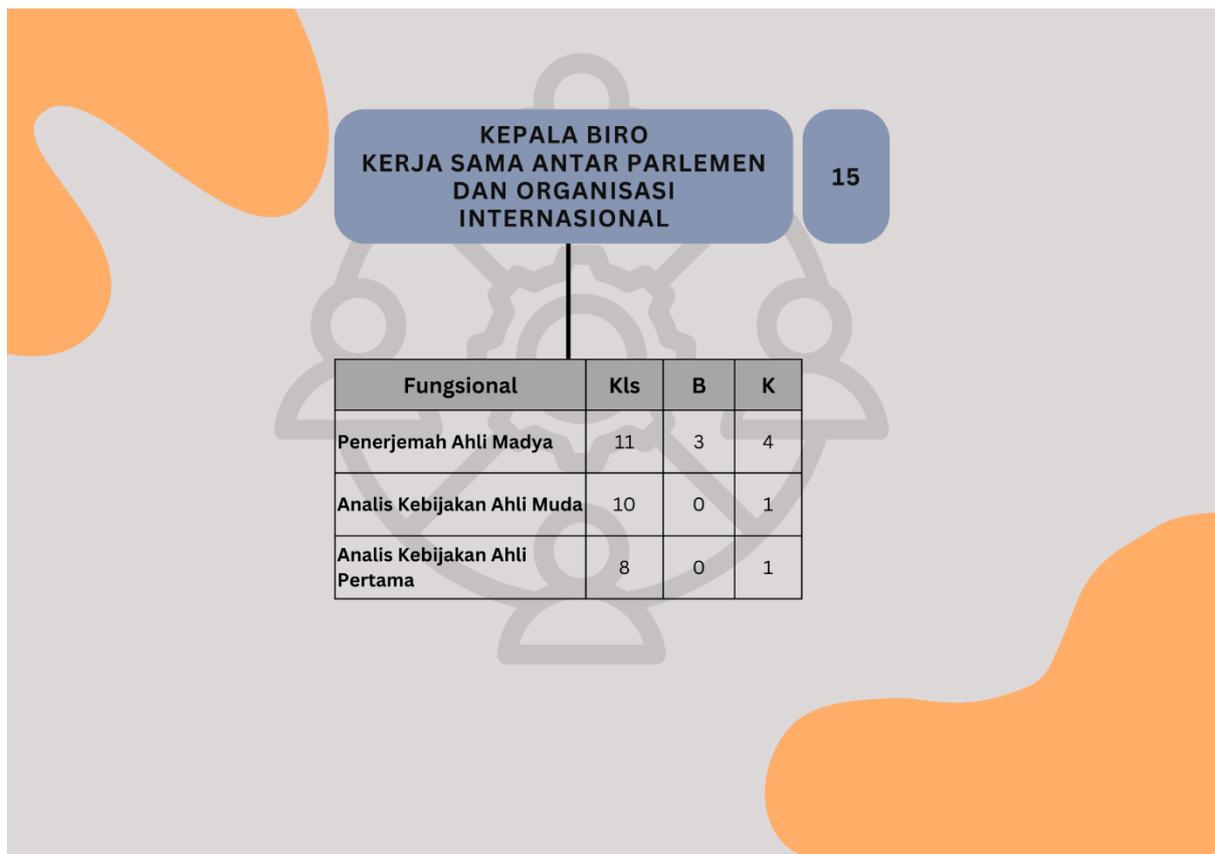
Gambar 7: Peta jabatan dan kebutuhan pegawai Bagian KSOR berdasarkan SK Sekjen Nomor 1504/SEKJEN/2024



Gambar 8: Peta jabatan dan kebutuhan pegawai Bagian Set. KSB berdasarkan SK Sekjen Nomor 1504/SEKJEN/2024



Gambar 9: Peta jabatan dan kebutuhan pegawai FKLNA dan ABA berdasarkan SK Sekjen Nomor 1504/SEKJEN/2024



Gambar 10: Peta jabatan dan kebutuhan pegawai Fungsional Penerjemah berdasarkan SK Sekjen Nomor 1504/SEKJEN/2024

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja di tahun 2024, Biro KSAP dan OI menghadapi beberapa tantangan strategis yang berkaitan erat dengan dinamika internal dan eksternal yang terdiri atas:

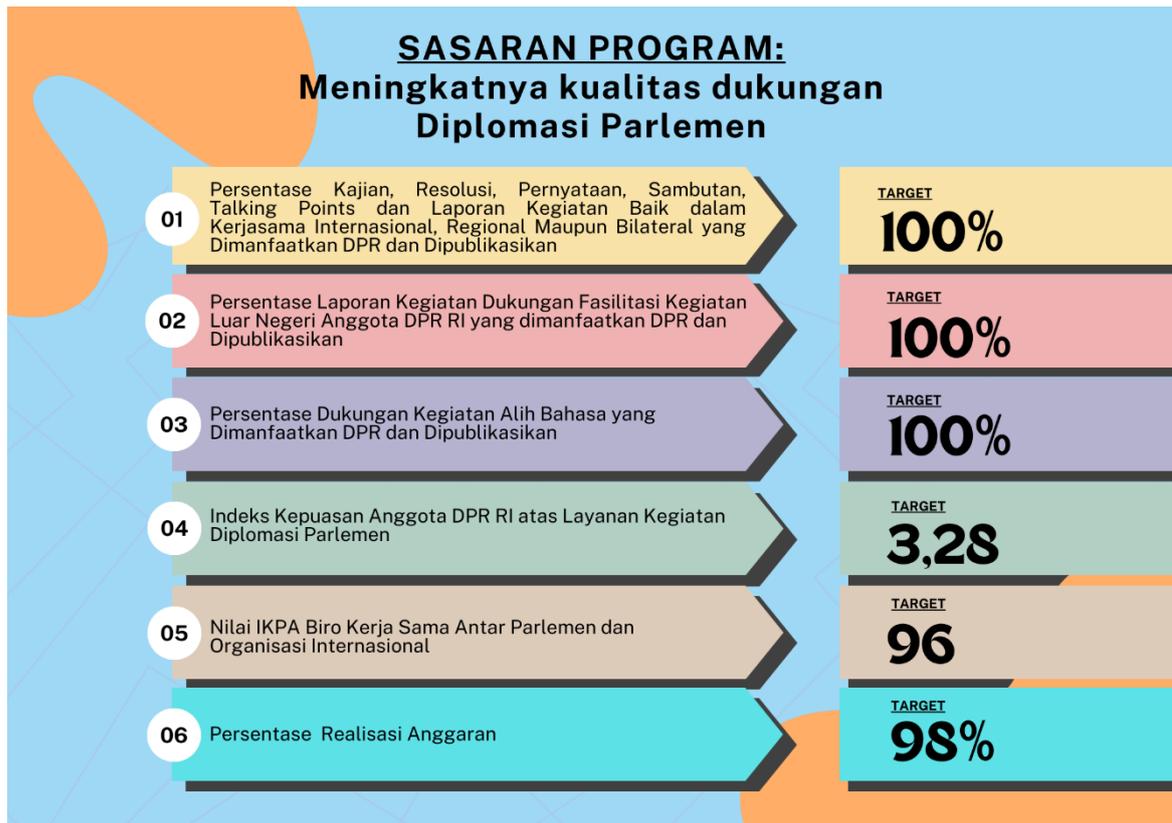
1. Pada tahun 2024 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) masih melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk DIPA tahun 2024. Kebijakan nasional ini memberikan efek yang cukup signifikan pada pelaksanaan kegiatan di Setjen DPR RI termasuk Biro KSAP dan OI.
2. Di Tahun 2024, Indonesia dalam hal ini DPR RI berkesempatan untuk menjadi tuan rumah 3 (tiga) sidang internasional yaitu: *Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum* di Nusa Dua, Bali, *2nd Meeting of Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* di Jakarta, dan *Indonesia Africa Parliamentary Forum* di Nusa Dua, Bali. Dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) sebagai sistem pendukung, khususnya Biro KSAP dan OI, merupakan *leading* unit dalam pelaksanaan sidang internasional tersebut. Besarnya skala kegiatan dan waktu pelaksanaan memberikan tantangan tersendiri bagi Biro KSAP dan OI. Selain itu keterbatasan anggaran DIPA Setjen DPR RI (Biro KSAP dan OI) akibat kebijakan realokasi dan refocusing anggaran secara nasional juga menambah kompleksitas penyelenggaraan tiga sidang internasional tersebut.
3. Pada tahun 2024, Biro KSAP DPR-RI menghadapi tantangan signifikan akibat bertepatan dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan dimulainya periode legislatif

baru. Transisi anggota parlemen membawa dinamika baru terutama dalam memastikan kesinambungan diplomasi parlemen di tengah pergantian anggota DPR. Pergantian ini sering kali disertai kebutuhan adaptasi terhadap prioritas, visi, dan strategi baru dari para anggota legislatif yang dilantik. Selain itu, fokus internal pada proses pemilu dan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu internasional yang sedang berlangsung.

Dengan adanya pergantian keanggotaan tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi BKSAP, karena beberapa sidang penting yang memiliki nilai strategis bagi BKSAP tidak dapat dihadiri antara lain sidang Inter-Parliamentary Union dan sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly

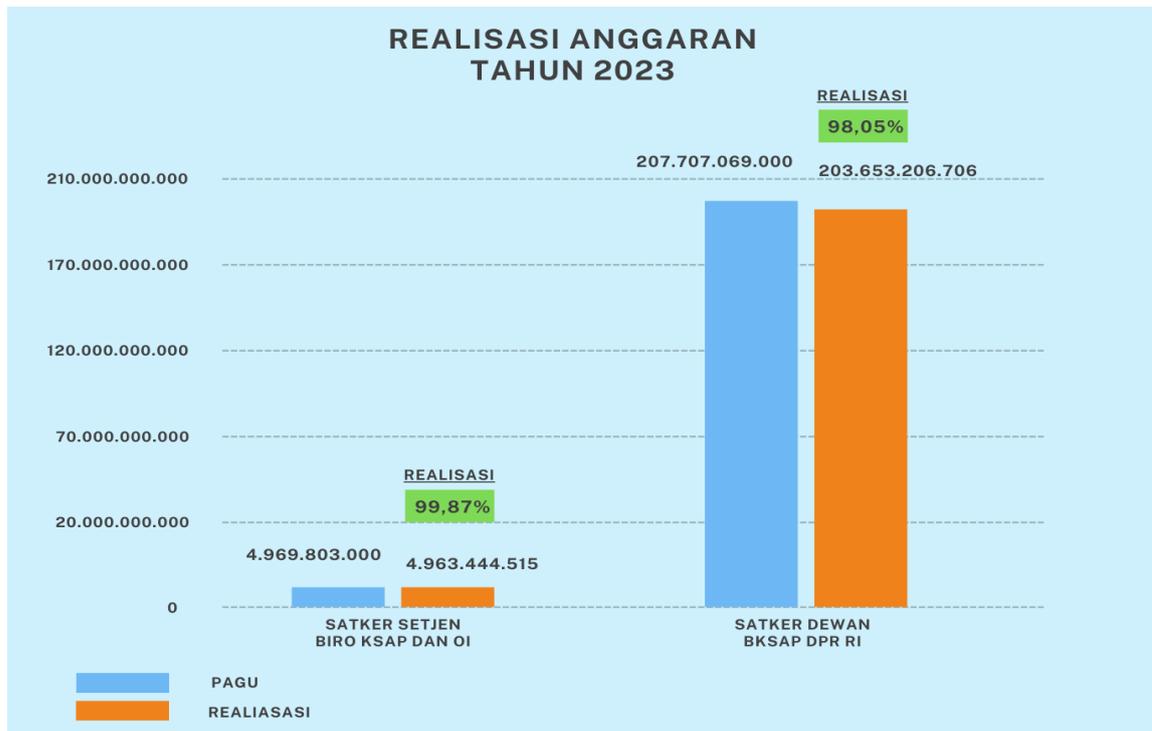
4. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kunjungan luar negeri Anggota DPR RI dalam rangka peran diplomasi Parlemen diantisipasi melalui strategi pemilihan negara dengan indeks biaya perjalanan dinas yang lebih rendah dari yang direncanakan di DIPA dan disesuaikan dengan penerimaan dari parlemen yang dituju. Di tahun 2024 direncanakan pengiriman 3 GKSB, 2 Kunjungan Diplomasi BKSAP. Realisasi kunjungan GKSB dapat dilaksanakan sebanyak 19 kali, kunjungan diplomasi BKSAP terlaksana 7 kali.
5. Rencana Kunjungan Perorangan Anggota untuk **116 Anggota**. Realisasi kunjungan kerja perorangan Anggota terlaksana untuk **140 anggota DPR RI**.
6. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kegiatan pengiriman delegasi sidang-sidang regional dan internasional. Dengan demikian, pengiriman delegasi menjadi terbatas, disesuaikan dengan tingkat prioritas.
7. Mutasi pegawai di Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) DPR-RI juga memberikan dampak signifikan terhadap kinerja, baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, mutasi dapat menghadirkan perspektif baru, ide-ide segar, dan dinamika kerja yang lebih inovatif. Di sisi lain, pergantian pegawai yang sudah memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu diplomasi parlemen dapat mengganggu kesinambungan kerja, terutama dalam menangani hubungan internasional yang kompleks dan membutuhkan konsistensi.

Berdasarkan Renstra Setjen DPR RI, Biro KSAP dan OI telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024 yang berisi sasaran program, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun serta capaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

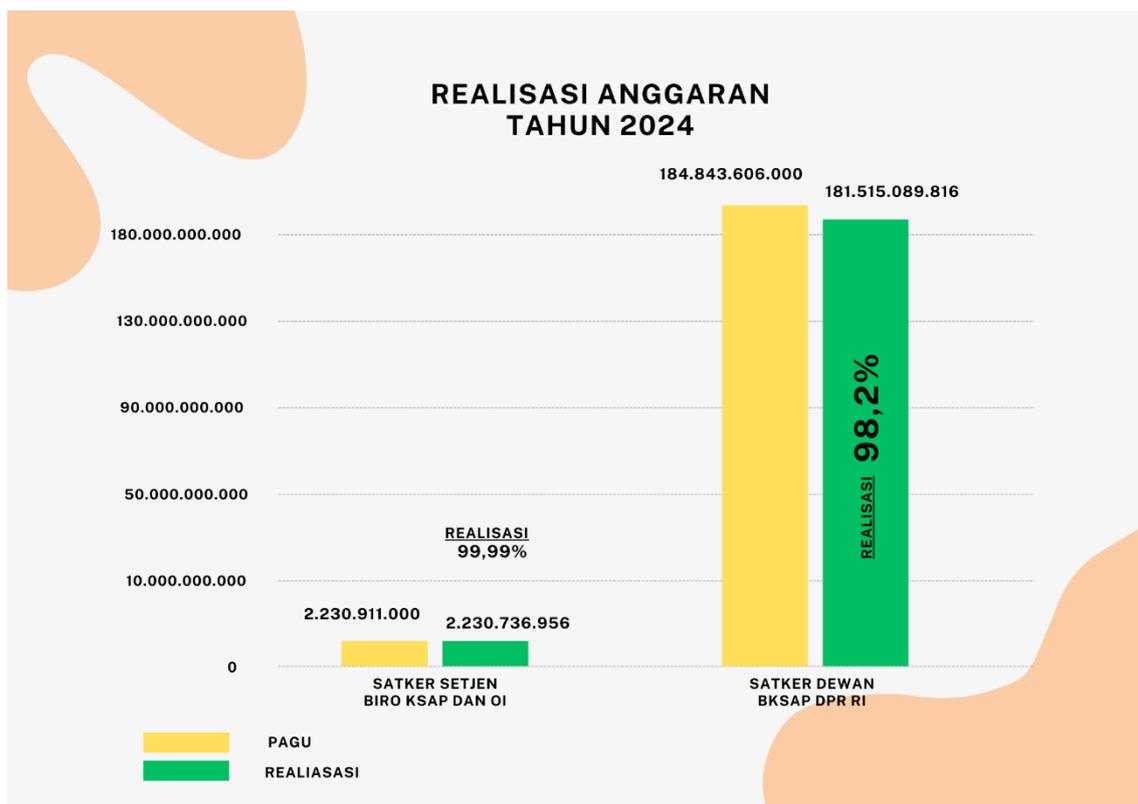


Gambar 11: Target dan sasaran program Biro KSAP tahun 2024

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Biro KSAP dan OI mengelola anggaran Satker Setjen dan Satker Dewan tahun 2024 dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:



Gambar 12: Realisasi anggaran Satker Setjen dan Satker Dewan BKSAP 2023



Gambar 13: Realisasi anggaran Satker Setjen dan Satker Dewan BKSAP 2024

Secara umum sasaran program/ kegiatan Biro KSAP dan OI sudah tercapai dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk selanjutnya menjadi rekomendasi untuk peningkatan kinerja Biro KSAP dan OI di masa mendatang, antara lain:

1. Dalam survei untuk meningkatkan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen, perlu dilaksanakan penyelarasan antara bentuk layanan yang diberikan dengan harapan dan ekspektasi Anggota DPR RI sebagai penerima layanan. Penyelarasan ini juga perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam pelaksanaan survei kepuasan oleh Setjen DPR RI. Selain itu, dalam menetapkan target kinerja hendaknya mengedepankan metode **S.M.A.R.T.** (*Specific, Measureable, Attainable, relevant dan Time-Bond*) khususnya dalam penetapan target yang realistis dan dapat dicapai.
2. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran dengan lebih optimal dan menetapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan sebagai *exit strategy* dalam menghadapi risiko pelaksanaan refocussing/ realokasi anggaran di Setjen DPR RI/ secara nasional di masa yang akan datang. Apabila akan ada penambahan anggaran, lebih baik diperoleh lebih awal agar dapat dipergunakan secara maksimal.
3. Terkait Zona Integritas dan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih, Biro KSAP dan OI terus berinovasi dalam memberikan layanan kepada *stakeholder* dan terus melakukan berbagai perbaikan dalam rangka mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), akan tetapi perlu diingat bahwa untuk meraih predikat WBBM diperlukan nilai SAKIP Institusi dengan Nilai A, untuk itu diperlukan kerja sama dari semua pihak.

4. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, yang memiliki penguasaan substansi tentang isu-isu hubungan internasional baik bilateral, regional maupun internasional, serta disiplin ilmu lainnya melalui diklat/sekolah/seminar/kursus, termasuk peningkatan kompetensi para pejabat fungsional penerjemah DPR RI.
5. Perlunya pengembangan teknologi informasi (TI) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPR RI dan masyarakat, yaitu dengan *updating* database BKSAP, inovasi aplikasi berbagai sistem kerja untuk kerja yang efektif dan efisien, dan *update* pemuatan informasi kegiatan BKSAP terbaru melalui website dan sosial media DPR RI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
6. Biro KSAP perlu mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur terhadap pelaksanaan diplomasi parlemen, baik bilateral maupun multilateral. Evaluasi tersebut harus mencakup dampak langsung dari partisipasi dalam forum internasional terhadap kepentingan strategis Indonesia serta tingkat kepuasan anggota DPR RI terhadap hasil kegiatan. Hal ini akan membantu dalam memperbaiki program kerja yang lebih relevan dan efektif di masa mendatang.
7. BKSAP perlu memperkuat sinergi dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya serta lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, serta organisasi internasional dan mitra parlemen di luar negeri untuk meningkatkan efektivitas diplomasi parlemen. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam forum global tetapi juga menciptakan peluang bagi diplomasi ekonomi, politik, dan budaya melalui pendekatan lintas sektor yang lebih terintegrasi.



BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL



I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 20A ayat(1), DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang diatur selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Selain ketiga fungsi tersebut, DPR RI juga memiliki fungsi lainnya yaitu diplomasi parlemen.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuklah Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) sebagai aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi dan keahlian.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional (Biro KSAP dan OI) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Setjen DPR RI nomor 2 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Setjen dan BK DPR RI.

LKj Biro KSAP dan OI tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024, sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja tahun mendatang, serta sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro KSAP dan OI dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

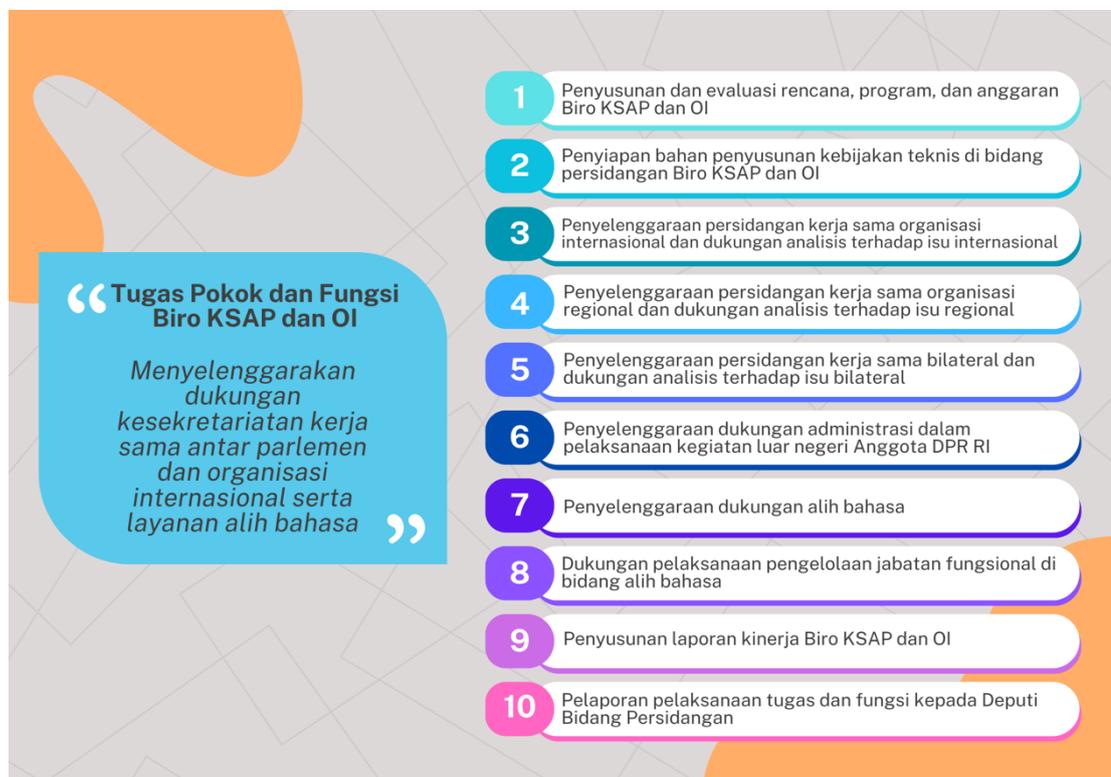
Laporan Kinerja ini juga menjadi wujud nyata dari implementasi budaya BerAkhlak, dengan fokus utama pada penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Lebih dari itu, laporan ini juga menegaskan pentingnya langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi. Hal ini dilakukan dengan menjadikan capaian output tahun 2024 sebagai landasan evaluasi dan pijakan untuk mendorong optimalisasi program di masa mendatang. Upaya ini selaras dengan tujuan besar untuk memperkuat nilai SAKIP, sehingga mampu mencerminkan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab di semua aspek.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam Persekjen ini dijabarkan susunan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI serta kedudukan, tugas dan fungsi dari Biro KSAP dan OI.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Biro KSAP dan OI merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Persidangan. Tugas pokok dan fungsi Biro KSAP dan OI sebagaimana terdapat dalam berikut:



Gambar 14: Tugas pokok dan fungsi Biro KSAP dan OI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro KSAP dan OI didukung oleh 4 (empat) unit kerja setingkat eselon III dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

1. Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional;
2. Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional;
3. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral;
4. Bagian Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada bulan Oktober 2024, telah dilaksanakan mutasi pejabat di lingkungan Biro KSAP. Struktur organisasi Biro KSAP dan OI tergambar dalam gambar berikut:



Gambar 15: Struktur organisasi Biro KSAP dan OI

D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Beberapa permasalahan strategis yang dihadapi Biro KSAP dan OI berkaitan erat dengan dinamika internal dan eksternal yang terdiri atas:

1. Pada tahun 2024 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) masih melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk DIPA tahun 2024. Kebijakan nasional ini memberikan efek yang cukup signifikan pada pelaksanaan kegiatan di Setjen DPR RI termasuk Biro KSAP dan OI.
2. Di Tahun 2024, Indonesia dalam hal ini DPR RI berkesempatan untuk menjadi tuan rumah 3 (tiga) sidang internasional yaitu: Parliamentary

Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum di Nusa Dua, Bali, 2nd Meeting of Indonesia Pacific Parliamentary Partnership di Jakarta, dan Indonesia Africa Parliamentary Forum di Nusa Dua, Bali. Dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) sebagai sistem pendukung, khususnya Biro KSAP dan OI, merupakan *leading* unit dalam pelaksanaan sidang internasional tersebut. Besarnya skala kegiatan dan waktu pelaksanaan memberikan tantangan tersendiri bagi Biro KSAP dan OI. Selain itu keterbatasan anggaran DIPA Setjen DPR RI (Biro KSAP dan OI) akibat kebijakan realokasi dan refocusing anggaran secara nasional juga menambah kompleksitas penyelenggaraan tiga sidang internasional tersebut.

3. Pada tahun 2024, Biro KSAP DPR-RI menghadapi tantangan signifikan akibat bertepatan dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan dimulainya periode legislatif baru. Transisi anggota parlemen membawa dinamika baru terutama dalam memastikan kesinambungan diplomasi parlemen di tengah pergantian anggota DPR. Pergantian ini sering kali disertai kebutuhan adaptasi terhadap prioritas, visi, dan strategi baru dari para anggota legislatif yang dilantik. Selain itu, fokus internal pada proses pemilu dan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu internasional yang sedang berlangsung.

Dengan adanya pergantian keanggotaan tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi BKSAP, karena beberapa sidang penting yang memiliki nilai strategis bagi BKSAP tidak dapat dihadiri antara lain sidang Inter-Parliamentary Union dan sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly.

4. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kunjungan luar negeri Anggota DPR RI dalam rangka peran diplomasi Parlemen diantisipasi melalui strategi pemilihan negara dengan indeks biaya perjalanan dinas yang lebih rendah dari yang direncanakan di DIPA dan disesuaikan dengan penerimaan dari parlemen yang dituju. Di tahun 2024 direncanakan pengiriman 3 GKSB, 2 Kunjungan Diplomasi BKSAP. Realisasi kunjungan GKSB dapat dilaksanakan sebanyak 19 kali, kunjungan diplomasi BKSAP terlaksana 7 kali.
5. Rencana anggaran Kunjungan Perorangan Anggota semula diperuntukkan bagi 116 (seratus enam belas) orang namun dalam pelaksanaannya menjadi 140 (seratus empat puluh) anggota DPR RI.
6. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kegiatan pengiriman delegasi sidang-sidang regional dan internasional. Dengan demikian, pengiriman delegasi menjadi terbatas, disesuaikan dengan tingkat prioritas.
7. Mutasi pegawai di Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) DPR-RI juga memberikan dampak signifikan terhadap kinerja, baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, mutasi dapat menghadirkan perspektif baru, ide-ide segar, dan dinamika kerja yang lebih inovatif. Namun, di sisi lain, pergantian pegawai yang sudah memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu diplomasi parlemen dapat mengganggu kesinambungan kerja, terutama dalam menangani hubungan internasional yang kompleks dan membutuhkan konsistensi.



II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

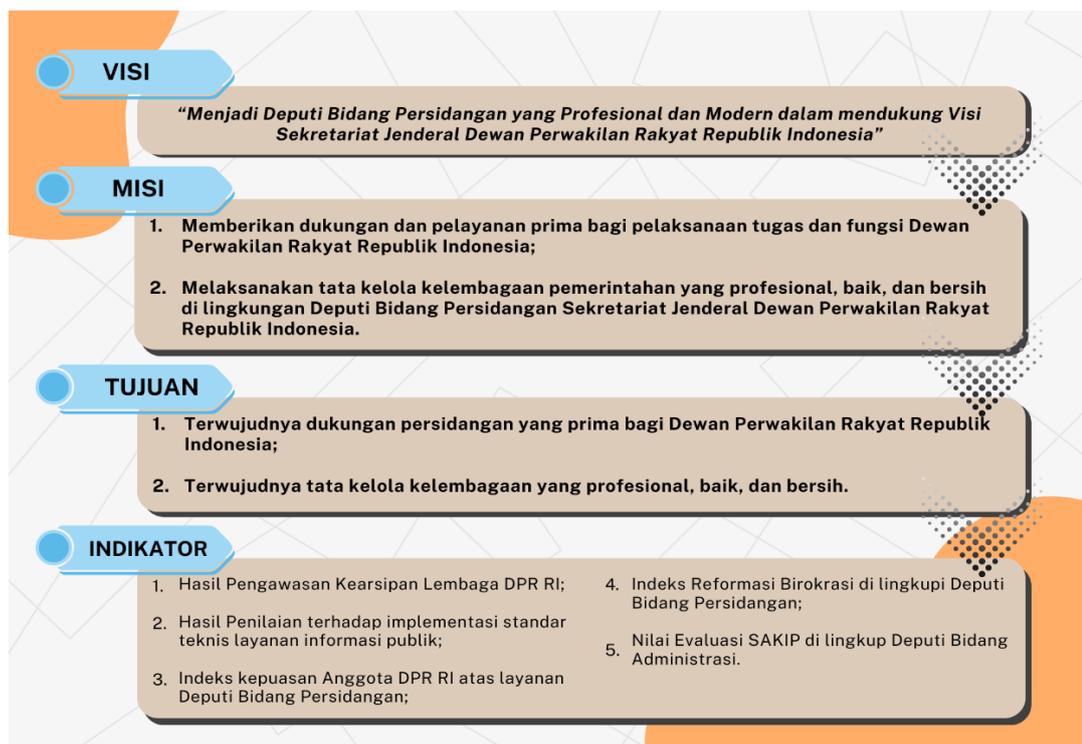
A. RENCANA STRATEGIS SETJEN DPR RI TAHUN 2020 – 2024

Berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI nomor 18 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekjen DPR RI nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Setjen DPR RI tahun 2020-2024, untuk mendukung visi DPR RI, maka Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI memiliki **visi, misi dan tujuan** sebagai berikut:



Gambar 16: Rencana Strategis Setjen DPR RI

Adapun rencana strategis Deputy Bidang Persidangan berdasarkan peraturan Sekjen DPR RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Setjen DPR RI sebagai berikut:



Gambar 17: Rencana Strategis Deputy Bidang Persidangan Setjen DPR RI

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Melalui perencanaan organisasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, administrasi serta dukungan teknis lainnya, Biro Kerja Sama antar Parlemen mendukung dan memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan misi diplomasi Parlemen yang dilaksanakan oleh DPR RI.

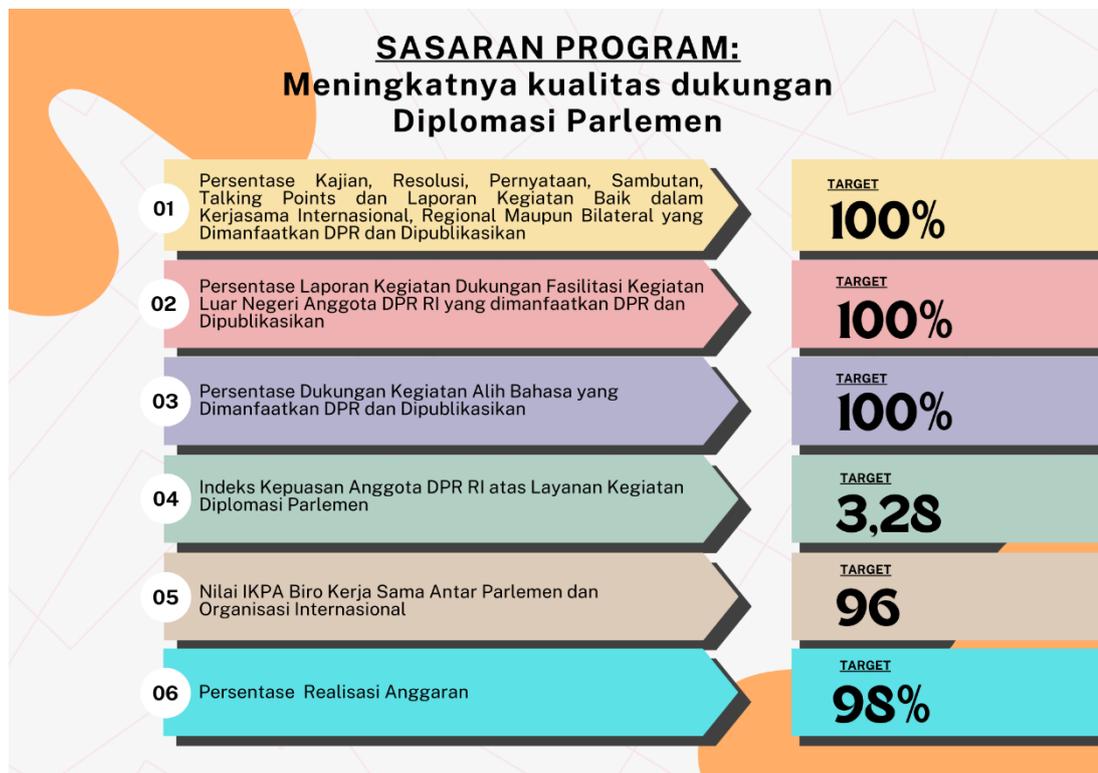
Misi diplomasi DPR tersebut tidak saja melalui dialog atas berbagai isu-isu internasional dalam kerangka organisasi yang merangkum kerjasama keparlemenan dan kerjasama bilateral tetapi juga melalui pengawasan terhadap berbagai negosiasi internasional dan pelaksanaan berbagai kesepakatan yang sudah diadopsi oleh pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya, perjanjian-perjanjian internasional tersebut selalu mendahulukan kepentingan nasional, sejalan dengan norma dan hukum internasional dan menjunjung tinggi penegakan hukum di dalam negeri. Salah satu contoh, BKSAP DPR RI telah mengambil peran strategis dalam mewujudkan ASEAN sebagai *Epicentrum of Growth* sejalan dengan program pemerintah. Isu kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina serta kontribusi terhadap krisis kemanusiaan warga Rohingya di Myanmar, juga masih menjadi fokus diplomasi BKSAP tahun 2024, selain juga isu Pembangunan Berkelanjutan.

Berbagai keterlibatan DPR RI di kancah internasional tersebut didukung oleh Biro KSAP dan OI sebagai bagian dari Kesekretariatan Jenderal yang memberikan dukungan teknis dan keahlian kepada Dewan.

Saat ini Biro KSAP bukan saja memberikan dukungan kepada anggota BKSAP, namun juga kepada Pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI melalui program Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dan kunjungan diplomasi parlemen perorangan. Selain itu, Biro KSAP juga memberi dukungan kepada anggota parlemen sedunia yang menjadi anggota *ASEAN Parliamentarians against Corruption (SEAPAC)* mengingat saat ini Indonesia menjadi markas besar dari organisasi tersebut

C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro KSAP dan OI telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Perjanjian kinerja berisi sasaran program, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir tahun. Penetapan Kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2024 sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 18: Target dan sasaran program Biro KSAP tahun 2024

ESELON I	
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	
SASARAN PROGRAM	
S.1	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas
Indikator	Target
1	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR A (88)
2	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Informatif (98,15)
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 96
SASARAN PROGRAM	
S.2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan
Indikator	Target
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan 3.33
SASARAN PROGRAM	
S.3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas
Indikator	Target
1	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan BB (80,00)

ESELON II	
BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL	
SASARAN KEGIATAN	
S.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Diplomasi Parlemen
Indikator	Target
1	Persentase Kajian, Resolusi, Pernyataan, Sambutan, Talking Point, dan Laporan Kegiatan, Baik dalam Kerjasama Internasional, Regional, maupun Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan 100%
2	Persentase Laporan Kegiatan Dukungan Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI, yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan 100%
3	Persentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan 100%
4	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen 3.28
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 96
6	Persentase Realisasi Anggaran 98.00%

Untuk mendukung pencapaian sasaran program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024, telah dialokasikan dana pada satker Setjen untuk Program Dukungan Manajemen Biro KSAP dan OI dengan pagu anggaran sebesar Rp2.844.641.000 (Dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah). Namun pada awal tahun 2024, dilakukan optimalisasi atas anggaran tersebut sebesar Rp613.730.000 (Enam ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Sehingga, Program Dukungan Manajemen di Biro KSAP dan OI tahun 2024 menjadi Rp2.230.911.000 (*Dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah*) yang dilaksanakan oleh 4 (empat) unit kerja di lingkungan Biro KSAP dan OI.

Adapun pagu anggaran untuk satker Dewan sebesar Rp184.843.606.000 (Seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam ribu rupiah).



BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL



III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BIRO KSAP DAN OI

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran Program yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja Biro KSAP dan OI Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	1. Persentase Kajian, Resolusi, Pernyataan, Sambutan, Talking Points dan Laporan Kegiatan Baik dalam Kerjasama Internasional, Regional Maupun Bilateral yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Laporan Kegiatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
		4. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,28	3,74	114,02%

	5. Nilai IKPA Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	96	77,12	80,3%
	6. Persentase Realisasi Anggaran	98%	98,20%	100,2%

B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Evaluasi capaian kinerja program dan indikator kinerja Biro KSAP dan OI tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Kinerja I:

Persentase Kajian, Resolusi, Pernyataan, Sambutan, Talking Points dan Laporan Kegiatan Baik dalam Kerjasama Internasional, Regional Maupun Bilateral yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan

Pada akhir tahun 2024, Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan: Kerja Sama Internasional (KSI), Kerja Sama Regional, dan Kerja Sama Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan, mencapai target sebesar 100%. Pencapaian ini sama dengan pencapaian di tahun 2023.

NO	INDIKATOR	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	N/A
2.	Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	N/A
3.	Persentase sambutan, talking points, dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral dan Diplomasi Perorangan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	N/A
4.	Persentase kajian, Resolusi resolusi, pernyataan, sambutan, talking points dan laporan kegiatan baik dalam Kerja Sama	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100%

Internasional, Regional, maupun Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan						
--	--	--	--	--	--	--

Ada perubahan indikator untuk Biro KSAP pada tahun 2024, yang semula terpisah antara kerjasama Internasional, Regional dan Bilateral, menjadi satu indikator yaitu : Persentase Kajian, Resolusi, Pernyataan, Sambutan, Talking Points dan Laporan Kegiatan Baik dalam Kerjasama Internasional, Regional Maupun Bilateral yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan

Kajian, konsep resolusi, pernyataan dan laporan kegiatan yang dimaksudkan di sini adalah berbagai dokumen persiapan ketika DPR RI mengirimkan delegasi untuk menghadiri sidang-sidang Internasional, Regional, maupun pengiriman delegasi bilateral.

Biro KSAP dan OI sebagai *supporting system* menyiapkan berbagai kajian, konsep resolusi, dan juga laporan kegiatan bagi Anggota DPR RI yang menghadiri sidang-sidang tersebut. Laporan kegiatan telah dipublikasikan di website ksap.dpr.go.id, dan berita tentang kegiatan juga dipublikasikan di media sosial BKSAP DPR RI.

Selain pengiriman Delegasi, Biro KSAP dan OI juga bertanggung jawab dalam mempersiapkan penyelenggaraan sidang internasional maupun regional yang diselenggarakan di Indonesia yaitu *Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum* di Nusa Dua, Bali, *2nd Meeting of Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* di Jakarta, dan *Indonesia Africa Parliamentary Forum* di Nusa Dua, Bali.

Biro KSAP dan OI juga memberikan dukungan untuk kegiatan Dewan lainnya seperti mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kunjungan dalam negeri dalam rangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), BKSAP day serta beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara Hybrid/ Virtual.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup Kerja Sama Organisasi Internasional (KSI) antara lain terdiri atas:

1. Delegasi menghadiri sidang internasional sebanyak 15 kegiatan;
2. Penyelenggaraan sidang sebagai tuan rumah sebanyak 2 kali;
3. Mengikuti kegiatan rapat internasional secara virtual sebanyak 10 kali;
4. Melakukan kegiatan kunjungan daerah (BKSAP Day dan Panja) sebanyak 3 kali;
5. Melakukan rapat persiapan penyelenggaraan sidang sebanyak 50 kali untuk persiapan 2 sidang internasional.

Sementara untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup Kerja Sama Regional antara lain terdiri atas:

1. Delegasi menghadiri sidang regional sebanyak 12 kegiatan;

2. Penyelenggaraan sidang sebagai tuan rumah sebanyak 1 kali;
3. Mengikuti kegiatan rapat dan sidang regional secara virtual serta persiapan penyelenggaraan sidang sebanyak 2 kali;
4. Melakukan kegiatan kunjungan daerah (BKSAP day, Panja, Workshop dll) sebanyak 6 kali;

Untuk mendukung kegiatan bilateral, Biro KSAP dan OI juga menyiapkan dukungan bahan-bahan seperti sambutan, *talking points* maupun laporan-laporan kegiatan. Laporan pertemuan *Courtesy Call* maupun kegiatan bilateral lain maupun laporan kunjungan diplomasi perorangan juga telah dipublikasikan di website ksap.dpr.go.id, dan berita tentang kegiatan juga dipublikasikan di media sosial BKSAP DPR RI.

Selanjutnya, untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup Kerja Sama Bilateral antara lain terdiri atas:

1. Kegiatan kunjungan diplomasi BKSAP sebanyak 7 kegiatan;
2. Kegiatan kunjungan GKSB sebanyak 19 kegiatan;
3. Kegiatan kunjungan BKSAP Day sebanyak 3 kegiatan;
4. Kegiatan *courtesy call* sebanyak 48 kegiatan;
5. Kegiatan penerimaan tamu parlemen 10 kegiatan;
6. Kegiatan penerimaan tamu lainnya 11 kegiatan.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET JANGKA MENENGAH TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN (REALISASI AKHIR 2024)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	Persentase kajian, Resolusi resolusi, pernyataan, sambutan, <i>talking points</i> dan laporan kegiatan baik dalam Kerja Sama Internasional, Regional, maupun Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Tahun 2024 sebesar 100% maka realisasi untuk Tahun 2024 telah memenuhi target dengan tingkat kemajuan realisasi sebesar 100%.

Keberhasilan capaian tersebut dapat diperoleh berkat adanya penambahan anggaran serta peran dan dukungan SDM di lingkungan Biro KSAP dan OI dalam hal memberikan dukungan kepada para Anggota DPR RI berupa komunikasi intensif dengan panitia sidang dimana DPR RI diundang maupun koordinasi dengan KBRI negara tujuan pada pengiriman delegasi GKSB

maupun delegasi Diplomasi BKSAP serta komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak sehingga berbagai kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan berbagai kajian yang disiapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Anggota DPR RI. Hal ini tentu saja diperkuat dengan komitmen dari Pimpinan dan kerja sama tim yang baik.

Indikator Kinerja 2:

Persentase laporan kegiatan dukungan fasilitasi kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan.

NO	INDIKATOR	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Laporan kegiatan dukungan fasilitasi kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Indikator ini sesuai dengan perubahan dalam PK 2024 mengikuti perubahan struktur baru.

Sepanjang Tahun 2024, Biro KSAP dan OI telah melakukan dukungan fasilitasi kegiatan Luar Negeri kepada 176 Anggota. Kegiatan berupa kunjungan diplomasi perorangan ke beberapa negara sahabat untuk menjalankan diplomasi parlemen.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET JANGKA MENENGAH TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN (REALISASI AKHIR 2024)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	Persentase Laporan kegiatan dukungan fasilitasi kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan.	100%	100%	100%

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Tahun 2024 sebesar 100% maka realisasi untuk Tahun 2024 telah memenuhi target dengan tingkat kemajuan realisasi sebesar 100%.

Keberhasilan capaian tersebut dapat terwujud berkat peran dan dukungan SDM di lingkungan Biro KSAP dan OI dalam hal memberikan fasilitasi kepada para Anggota DPR RI berupa komunikasi intensif dengan KBRI negara tujuan serta berbagai pihak sehingga berbagai kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini tentu saja diperkuat dengan komitmen dari Pimpinan dan kerja sama tim yang baik.

Indikator Kinerja 3:

Pada akhir tahun 2024, persentase dukungan kegiatan alih bahasa DPR dan dipublikasikan, mencapai 100%. Pencapaian ini sama dengan pencapaian di tahun 2023.

NO	INDIKATOR	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Indikator ini sesuai dengan perubahan istilah dalam PK 2024.

Biro KSAP dan OI memberikan layanan alih Bahasa tidak hanya kepada Anggota BKSAP, tetapi juga kepada Pimpinan DPR, Alat Kelengkapan Dewan dan Setjen DPR RI. Selain itu Biro KSAP dan OI juga menerjemahkan sebagian berita di website DPR RI ke bahasa Inggris.

Kegiatan penerjemahan yang dilaksanakan Biro KSAP dan OI antara lain terdiri atas:

1. Penerjemahan tulisan sebanyak 1.153 tulisan;
2. Penerjemahan dengan *Simultaneous Interpreting System* (SIS) sebanyak 24 kegiatan
3. Penerjemahan secara konsekutif sebanyak 107 kegiatan.

Selain kegiatan tersebut, Biro KSAP dan OI juga mendukung upaya BKSAP untuk pembentukan Asosiasi Parlemen Bahasa Indonesia - Melayu. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yaitu kunjungan Delegasi BKSAP DPR RI ke Parlemen Brunei Darussalam untuk mendiskusikan rencana tersebut dan telah mendapatkan dukungan.

Deklarasi pembentukan asosiasi Parlemen Bahasa Indonesia-Melayu oleh Pimpinan BKSAP DPR RI, telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2024 di Bogor.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET JANGKA MENENGAH TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN (REALISASI AKHIR 2024)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	Persentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan.	100%	100%	100%

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Tahun 2024 sebesar



100% maka realisasi untuk Tahun 2024 telah memenuhi target dengan tingkat kemajuan realisasi sebesar 100%.

Tentunya keberhasilan capaian ini dapat terwujud dengan adanya anggaran yang memadai, dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten serta merupakan wujud komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi dan kerja sama tim yang baik.

Indikator Kinerja 4:

Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen

Capaian Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen tahun 2024 adalah sebesar 114.02%, karena dari target nilai 3,28 diperoleh hasil nilai survei sebesar 3,74 sehingga realisasi capaian target Indeks kepuasan ini telah melebihi target.

Hasil penghitungan indeks kepuasan ini diperoleh dari hasil survei yang diberikan kepada para Anggota DPR RI yang telah menerima layanan kegiatan diplomasi parlemen.

Dalam tabel berikut menggambarkan persandingan target dan capaian indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen tahun 2022 s.d 2024.

NO	INDIKATOR	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,40	3,24	3,26	3,78	3,28	3,74

Capaian realisasi target sebesar 114,02% di tahun 2024 merupakan indikasi bahwa Biro KSAP dan OI telah melaksanakan kinerja dengan baik terutama dalam memberikan layanan kegiatan diplomasi parlemen kepada Anggota DPR RI. Selain itu perlu dilakukan penyelarasan antara bentuk layanan yang diberikan Biro KSAP dan OI dengan harapan dan ekspektasi Anggota DPR RI sebagai penerima layanan serta variabel-variabel yang diperhitungkan dalam pelaksanaan survei kepuasan.

Beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian bagi Biro KSAP dan OI untuk perbaikan layanan diplomasi parlemen, berdasarkan hasil survei, antara lain:

- Agar dapat mengembangkan dan menjadi jembatan dalam keikutsertaan unit lain dalam mengikuti organisasi internasional terkait keparlemenan: menekankan pentingnya peran sebagai penghubung antara unit-unit dalam rangka mengikuti organisasi internasional terkait keparlemenan.

- Dapat dihubungi di luar jam kantor: Mengusulkan agar lebih fleksibel dalam hal komunikasi, dengan menyediakan saluran untuk dihubungi di luar jam kerja formal.
- Koordinasi lebih baik lagi dalam hal permintaan layanan dan pemberian layanan : menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan permintaan dan pemberian layanan untuk efisiensi yang lebih baik.
- Lebih dipercepat pengeluaran brafaks: menyoroti perlunya percepatan dalam pengeluaran brafaks agar tidak menghambat proses kerja.
- Sosialisasi layanan ditingkatkan: Menyarankan peningkatan sosialisasi tentang layanan yang tersedia untuk memastikan informasi tersebar dengan baik.
- Dilengkapi dan terus *diupdate* prosedur dan tata kerja di BKSAP: Mengusulkan untuk selalu memperbaharui dan menyempurnakan prosedur dan tata kerja di BKSAP agar tetap relevan dan efisien.
- Prosedur layanan lebih dipublikasikan: Menyarankan agar prosedur layanan lebih dipublikasikan, untuk memastikan pemahaman yang jelas dan terbuka.
- Layanan yang diberikan oleh Biro KSAP sangat baik, untuk itu tetap dipertahankan: Memberikan pengakuan terhadap kualitas layanan yang ada dan mendorong agar kualitas tersebut dipertahankan.
- Lebih mudah berkomunikasi dan respons cepat dari rekan-rekan semua di BKSAP: Menekankan pentingnya kemudahan komunikasi dan respons yang cepat dari tim untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
- Percepatan layanan penerjemahan tertulis: Menyampaikan saran untuk mempercepat proses layanan penerjemahan tertulis agar lebih efisien.
- Koordinasi antar bagian di bawah Biro KSAP harus lebih ditingkatkan: Menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antar bagian di dalam Biro KSAP untuk memastikan kelancaran dan efisiensi operasional.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET JANGKA MENENGAH TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN (REALISASI AKHIR 2024)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen	3.74	3,28	114,02%

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Tahun 2024 sebesar 3,28 maka realisasi untuk Tahun 2024 telah melebihi target sebesar 114,02%.

Keberhasilan capaian untuk indikator ini bergantung dari persepsi dan penilaian para anggota dewan yang telah disurvei, tentunya hal ini tak terlepas dari kinerja dari Biro KSAP dan OI yang baik sehingga mendapatkan penilaian yang baik dari anggota. Sementara itu, untuk target 2025 masih dalam angka 3,28 diharapkan realisasinya nanti akan melebihi target sebagaimana tahun ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 5:

Nilai IKPA Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional

Capaian Nilai IKPA Biro KSAP dan OI pada tahun 2024 adalah 77,12. Adapun target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 adalah 96. Ada beberapa indikator pendukung capaian nilai IKPA di Biro KSAP dan OI, yaitu Revisi DIPA mendapat angka 10 dengan target PK 9,60. Deviasi Halaman III DIPA 9,50 dengan target 19,20. Penyerapan anggaran hingga desember 2024 memperoleh angka 17,41 dengan target pada PK 2024 adalah 24,00. Penyelesaian tagihan 10 dengan target 14,40. Sedangkan capaian output yang diperoleh Biro KSAP dan OI adalah 12,50 dengan angka target yang ditetapkan 28,80.

NO.	BULAN	PENYERAPAN ANGGARAN	DEVIASI HAL. III DIPA	PENYELESAIAN TAGIHAN	BELANJA KONTRAKTUAL	REVISI DIPA	CAPAIAN OUTPUT	NILAI IKPA
1.	Januari	0,71	15,0	10,00	10,00	10,00	12,50	64,67
2.	Februari	5,79	14,13	10,00	10,00	10,00	3,75	59,64
3.	Maret	16,33	14,04	10,00	10,00	10,00	3,75	71,25
4.	April	13,49	14,28	10,00	10,00	10,00	3,75	68,36
5.	Mei	15,66	14,43	10,00	10,00	10,00	3,75	70,93
6.	Juni	16,84	13,44	10,00	10,00	10,00	3,75	71,15
7.	Juli	15,28	12,38	10,00	10,00	10,00	12,50	77,96
8.	Agustus	16,27	12,43	10,00	10,00	10,00	12,50	79,11
9.	September	16,46	11,46	10,00	10,00	10,00	25,00	92,13
10.	Oktober	15,70	10,31	10,00	10,00	10,00	12,50	76,13
11.	November	16,05	9,38	10,00	10,00	10,00	7,25	69,64
12.	Desember (Final)	17,41	9,50	10,00	10,00	10,00	12,50	77,12

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro KSAP DPR RI tahun 2024 tidak tercapai disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain adalah:

1. Dinamika internal yang timbul akibat transisi periode legislatif baru pasca Pemilu 2024, yang memengaruhi proses perencanaan dan eksekusi kegiatan anggaran.
2. Penyesuaian terhadap refocusing atau realokasi anggaran nasional yang diberlakukan selama tahun berjalan menyebabkan keterlambatan dalam proses pengesahan revisi DIPA, sehingga berdampak pada ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja.
3. Keterlambatan pada belanja kontraktual di awal triwulan juga terjadi karena adanya penyesuaian administrasi di tengah perubahan prioritas program. Hal ini diperburuk dengan rendahnya penyerapan triwulanan dan akumulasi pembayaran tagihan di akhir tahun anggaran, yang menyebabkan penumpukan pencairan dana di penghujung tahun.
4. Belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan Periode 2024-2029, berdampak terhadap agenda Delegasi BKSAP DPR RI tidak dapat menghadiri Sidang-Sidang Internasional yang telah dijadwalkan/ditetapkan sebelumnya, sehingga Anggaran yg telah disiapkan tidak terserap secara optimal.
5. Keterlambatan pembayaran ke vendor/EO yang telah diberikan dokumen pertanggungjawaban yang telah selesai dikerjakan, namun respon yang lambat dari pihak vendor mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pembayaran, sehingga BKSAP mendapatkan Dispen dari KPPN. Hal ini turut mempengaruhi penilaian IKPA di lingkup BKSAP TA 2024.

Tantangan ini menunjukkan perlunya evaluasi dan optimalisasi mekanisme pengelolaan anggaran agar lebih responsif dan efektif kedepannya.

Indikator Kinerja 6:

Persentase realisasi anggaran Biro KSAP dan OI

Capaian Indikator persentase realisasi anggaran Biro KSAP dan OI mencapai 104,15%, dimana dari target 96% berhasil terealisasi hingga 99,99% dari total anggaran. Secara lebih rinci capaian anggaran ini akan dijelaskan dalam bagian realisasi anggaran.

NO	INDIKATOR	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase realisasi anggaran Biro KSAP dan OI	95%	99,56%	96 %	99,87 %	98 %	99.99 %

Jika dilihat dari target tahun 2023 target sebesar 96% dengan realisasi sebesar 99,87%, pada tahun 2024 mengalami peningkatan yakni target 98% dengan capaian realisasi sebesar 99,99%.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET JANGKA MENENGAH TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN (REALISASI AKHIR 2024)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	Persentase realisasi anggaran Biro KSAP dan OI.	99.99%	98%	104.15%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 98% maka target tahun 2024 telah melampaui sebesar 99,99% yakni sebesar 1,99%. Sementara itu, untuk target 2025 sebesar 98% diharapkan realisasinya nanti akan melebihi target, sebagaimana tahun 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran BKSAP tahun 2024 yang mencapai 99,99%, melebihi target awal sebesar 98%, disebabkan oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan strategis yang mendukung program diplomasi parlemen, kerjasama bilateral, dan multilateral secara intensif.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			2024	
			Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	Capaian Output	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	Persentase kajian, resolusi, pernyataan, sambutan, talking points dan laporan kegiatan baik dalam Kerja Sama Internasional Regional, maupun Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100%	100%	100%	Rp2.230.911.000	Rp2.230.736.956	99.99%	1.0001	Efisien
2.		Persentase laporan kegiatan dukungan fasilitasi kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%	100%	100%				1.0001	Efisien
3.		Persentase dukungan kegiatan	100 %	100%	100%				1.0001	Efisien

	Alih Bahasa yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan							
4.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen	3.28	3.74	114.02%			1.1403	Efisien
5.	Nilai IKPA Biro KSAP dan OI	96	77.12	80.33%			0.8034	Tidak Efisien
6.	Persentase Realisasi Anggaran Biro KSAP dan OI	98%	98.2 %	100.20%			1.0021	Efisien

Realisasi anggaran Biro KSAP tahun 2024 yang mencapai 99,99%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 98%, mencerminkan efisiensi tinggi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran. Pencapaian ini diperoleh melalui optimalisasi penggunaan anggaran pada kegiatan prioritas yang mendukung diplomasi parlemen, baik dalam forum bilateral maupun multilateral. Setiap program dirancang secara strategis dengan fokus pada dampak maksimal terhadap capaian kinerja. Selain itu, efisiensi juga tercermin dari kemampuan biro untuk menyesuaikan anggaran guna mendukung kegiatan mendesak dan tidak terduga, seperti partisipasi dalam forum internasional tambahan atau inisiatif strategis lainnya, tanpa mengurangi ketepatan sasaran penggunaan dana. Pengelolaan operasional yang lebih baik, termasuk evaluasi rutin, monitoring ketat, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi biaya administrasi, turut memperkuat efisiensi ini. Peningkatan koordinasi internal dan eksternal dengan mitra kerja juga membantu mengurangi biaya yang tidak perlu, sehingga program dapat terlaksana dengan biaya lebih hemat tanpa mengurangi kualitas atau output yang dihasilkan. Dengan pendekatan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil, capaian ini menjadi bukti keberhasilan Biro KSAP dalam memanfaatkan anggaran secara optimal sekaligus mendukung pencapaian target strategis organisasi secara keseluruhan.

Namun, untuk indikator IKPA belum bisa mencapai target pada tahun 2024, sehingga masih diperlukan beberapa perbaikan pada tahun 2025.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung fungsi Dewan, Biro KSAP dan OI ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023. Dalam DIPA tersebut, Biro KSAP dan OI mengelola 2 (dua) Satuan Kerja (Satker) Anggaran, yaitu Satker Setjen dan Satker Dewan. Dengan DIPA tersebut Biro KSAP dan OI melaksanakan tugas dan fungsi melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja.

1. Kinerja Anggaran Satker Setjen

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, Biro KSAP dan OI mengelola pagu anggaran satker setjen untuk Program Dukungan Manajemen setelah dilakukan optimalisasi sebesar Rp2.230.911.000 dimana telah direalisasikan sebesar Rp2.230.736.956 atau 99,99 %. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk:

- a. Perumusan Bahan Kebijakan Biro KSAP dan OI;
- b. Fasilitasi Kerja Sama Organisasi Internasional, Regional, Bilateral dan Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa.

NO	KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI	% REALISASI
1	Anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen	1.549.205.000	1.549.090.836	99,99%
2	Bagian Set. KSO Internasional	313.211.000	313.210.776	100%
3	Bagian Set. KSO Regional	175.431.000	175.431.000	100%
4	Bagian Set. KSB	145.314.000	145.313.344	100%
5	Bagian FKLNA dan Alih Bahasa	223.181.000	223.122.000	99,97%
Jumlah		2.230.911.000	2.230.736.956	99,99%

Perbandingan realisasi anggaran Satker Setjen dalam kurun waktu tahun 2021 sd. 2024 dijelaskan dalam tabel berikut:

TAHUN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
2021	4.418.351.000	4.287.822.120	97,05
2022	4.648.131.000	4.627.752.365	99,56
2023	4.969.803.000	4.963.444.515	99,87
2024	2.230.911.000	2.230.736.956	99,99

2. Kinerja Anggaran Satker Dewan

Dari total Pagu anggaran tahun 2024 untuk Satker Dewan sebesar Rp184.843.606.000 dimana telah direalisasikan sebesar Rp181.515.089.816 atau 98,2%. Anggaran Satker Dewan digunakan untuk penyelenggaraan konferensi dalam negeri, pengembangan hubungan kerja sama luar negeri dan pelaksanaan peran diplomasi Anggota DPR RI.

NO	KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI	% REALISASI
1	Kerja Sama Internasional	43.976.192.000	43.238.828.961	98,32%
2	Kerja Sama Regional	23.847.542.000	23.838.193.624	99,96%
3	Kerja Sama Bilateral	54.442.229.000	53.292.247.700	97,89%
4	FKLNA dan Alih Bahasa	62.577.643.000	61.145.819.531	97,71%
Jumlah		184.843.606.000	181.515.089.816	98,20

Perbandingan realisasi anggaran Satker Dewan dalam kurun waktu tahun 2021 s.d. 2024 dijelaskan dalam tabel berikut:

TAHUN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
2021	71.158.094.000	53.101.686.414	74,62
2022	106.018.387.000	105.387.627.152	99,41
2023	207.707.069.000	203.653.206.706	98,05
2024	184.843.606.000	181.515.089.816	98,20

Realisasi anggaran BKSAP tahun 2024 yang mencapai 99,99%, melebihi target awal sebesar 98%, disebabkan oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan strategis yang mendukung program diplomasi parlemen, kerjasama bilateral, dan multilateral secara intensif. Selain itu, adanya beberapa kegiatan mendesak yang tidak terduga, seperti partisipasi dalam forum internasional atau pertemuan penting, mendorong penyesuaian alokasi anggaran sehingga penggunaan dana menjadi lebih maksimal. Peningkatan kapasitas operasional dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan juga berkontribusi pada pencapaian ini, mencerminkan pelaksanaan program yang tidak hanya terukur tetapi juga akuntabel. Dengan perencanaan anggaran awal yang bersifat konservatif untuk mengantisipasi ketidakpastian, hasil realisasi yang melampaui target menunjukkan keberhasilan BKSAP dalam memaksimalkan anggaran untuk mendukung capaian kinerja secara menyeluruh.



BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL



IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI serta amanat reformasi birokrasi khususnya area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Biro KSAP dan OI telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas rencana kerja dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Biro KSAP dan OI terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja Biro KSAP dan OI Tahun 2024 menjabarkan capaian atas Indikator Kinerja yang mencerminkan capaian kinerja sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai oleh Biro KSAP dan OI. Secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan di Biro KSAP dan OI telah dilaksanakan dengan optimal dimana semua kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target Biro KSAP dan OI, serta pencapaian tujuan Setjen DPR RI.

B. REKOMENDASI

Secara umum sasaran program/kegiatan Biro KSAP dan OI sudah tercapai dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk selanjutnya menjadi rekomendasi bagi unit-unit terkait untuk mendukung peningkatan kinerja Biro KSAP dan OI di masa mendatang, antara lain:

1. Dalam survei untuk meningkatkan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan kegiatan diplomasi parlemen, perlu dilaksanakan penyelarasan antara bentuk layanan yang diberikan dengan harapan dan ekspektasi Anggota

DPR RI sebagai penerima layanan. Penyelarasan ini juga perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam pelaksanaan survei kepuasan oleh Setjen DPR RI. Selain itu, dalam menetapkan target kinerja hendaknya mengedepankan metode **S.M.A.R.T.** (*Specific, Measureable, Attainable, relevant* dan *Time-Bond*) khususnya dalam penetapan target yang realistis dan dapat dicapai.

2. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran dengan lebih optimal dan menetapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan sebagai *exit strategy* dalam menghadapi risiko pelaksanaan refocussing/ realokasi anggaran di Setjen DPR RI/secara nasional di masa yang akan datang. Apabila akan ada penambahan anggaran, lebih baik diperoleh lebih awal agar dapat dipergunakan secara maksimal.
3. Terkait Zona Integritas dan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih, Biro KSAP dan OI terus berinovasi dalam memberikan layanan kepada *stakeholder* dan terus melakukan berbagai perbaikan dalam rangka mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), akan tetapi perlu diingat bahwa untuk meraih predikat WBBM diperlukan nilai SAKIP Institusi dengan Nilai A, untuk itu diperlukan kerja sama dari semua pihak.
4. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, yang memiliki penguasaan substansi tentang isu-isu hubungan internasional baik bilateral, regional maupun internasional, serta disiplin ilmu lainnya melalui diklat/sekolah/seminar/kursus, termasuk peningkatan kompetensi para pejabat fungsional penerjemah DPR RI.
5. Perlunya pengembangan teknologi informasi (TI) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPR RI dan masyarakat, yaitu dengan *updating* database BKSAP, inovasi aplikasi berbagai sistem kerja untuk kerja yang efektif dan efisien, dan *update* pemuatan informasi kegiatan BKSAP terbaru melalui website dan sosial media DPR RI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
6. Biro KSAP perlu mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur terhadap pelaksanaan diplomasi parlemen, baik bilateral maupun multilateral. Evaluasi tersebut harus mencakup dampak langsung dari partisipasi dalam forum internasional terhadap kepentingan strategis Indonesia serta tingkat kepuasan anggota DPR RI terhadap hasil kegiatan. Hal ini akan membantu dalam memperbaiki program kerja yang lebih relevan dan efektif di masa mendatang.
7. BKSAP perlu memperkuat sinergi dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya serta lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, serta organisasi internasional dan mitra parlemen di luar negeri untuk meningkatkan efektivitas diplomasi parlemen. Kolaborasi ini tidak hanya

memperkuat posisi Indonesia dalam forum global tetapi juga menciptakan peluang bagi diplomasi ekonomi, politik, dan budaya melalui pendekatan lintas sektor yang lebih terintegrasi.

Jakarta, 16 Januari 2025
Plt. Kepala Biro KSAP dan OI


Beny Rahbandiyosa Sabri





LAMPIRAN





**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
Jabatan : Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suprihartini, S.IP., M.Si.
Jabatan : Deputy Bidang Persidangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

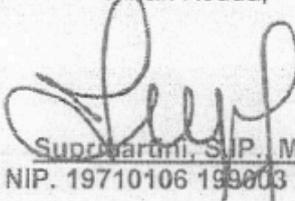
Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

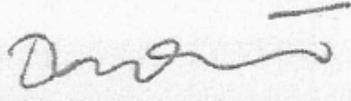
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Desember 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Suprihartini, S.IP., M.Si
NIP. 19710106 199003 2 001

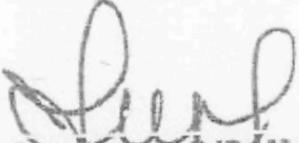

Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
NIP. 196804021993022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Diplomasi Parlemen	1. Persentase Kajian, Resolusi, Pernyataan, Sambutan, <i>Talking Points</i> dan Laporan Kegiatan Baik Dalam Kerjasama Internasional, Regional Maupun Bilateral yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100%
		2. Presentase Laporan Kegiatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100%
		3. Presentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100%
		4. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,28
		5. Nilai IKPA Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	96
		<ul style="list-style-type: none"> - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output 	<ul style="list-style-type: none"> 9,60 19,20 24,00 14,40 28,80
6. Persentase Realisasi Anggaran	98%		

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp2.844.641.000,00

Deputi Bidang Persidangan,


Suprihartini, S.IP., M.Si
 NIP. 19710106 199003 2 001

Jakarta, 6 Desember 2023
 Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen dan
 Organisasi Internasional,


Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
 NIP. 19680402 199302 2 001





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5615 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR: 03 / KP.10.03 / I / 2025**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, maka dipandang perlu untuk menugaskan Pejabat di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Interenasional Setjen DPR RI ;
b. bahwa penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Tugas.
- Dasar** : a. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023;
b. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021;
c. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dengan ini memberi Tugas:

Kepada :

No.	Nama	Peran	Jabatan
1.	Beny Rahbandiyosa Sabri, S.E. NIP. 19830628 200912 1 001	Ketua Tim	Kepala Bagian Set. KSOI
2.	Miranti Widiani, S.Sos., M.Si. NIP. 19821027 200912 2 003	Anggota	Kasubbag Rapat KSOI
3.	Iis Muldiyanti, S.Sos. NIP. 19770226 199603 2 001Iis	Anggota	Kasubbag Rapat KSR
4.	Saeful Anwar, S.IP., M. NIP. 19760708 199502 1	Anggota	Kasubbag Rapat KSB
5.	Helen, S.Sos., M.A.P. NIP. 19790425 199803 2 001	Anggota	Kasubbag Pelayanan Ahli Bahasa
6.	Erman Suhendri, S.Sos.I NIP. 19850924 201801 1 001	Anggota	Analisis Data dan Informasi
7.	Siti Masitoh NIP. 197302021997032004	Anggota	Pengolah Data dan Informasi

Untuk

: Melakukan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro KSAP dan OI Tahun 2024 pada tanggal 3 s.d. 17 Januari 2025. Dalam pelaksanaan penugasan, tim dilarang menerima gratifikasi dan wajib menyerahkan laporan maksimal 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya waktu penugasan.

Demikian Surat Tugas ini kami buat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, Januari 2025
Plt. Kepala Biro KSAP dan OI,



Beny Rahbandiyosa Sabri



**BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr